

Gerak ulang alik penduduk dan kemandirian sebuah Kota Baru: Kasus Bumi Serpong Damai, dibandingkan dengan Kota Bekasi

Tusy Augustine Samallo Adibroto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=82636&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang pesat - khususnya di DKI Jakarta - mengakibatkan tekanan yang berat terhadap kota, sehingga untuk mengatasinya dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah JABOTABEK yang menghasilkan strategi pembangunan arah timur - barat di kota-kota sekitarnya. Maka dilaksanakan pembangunan kota baru mandiri (self-contained) Bumi Serpong Damai seluas 7.000 ha. Diharapkan kota baru tersebut tidak lagi bergantung pada kota induk karena akan dilengkapi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup serta fasilitas perkotaan lain bagi penduduknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan membangun suatu kota baru mandiri dapat tercapai, apalagi jika mengingat 'jarak' yang relatif dekat dengan Kota induk dan aksesibilitas yang baik. Hal ini mengingat kenyataan terjadinya gerak ulang alik yang diambil sebagai indikator kemandirian suatu kota baru yang cukup besar ke Jakarta mencapai 310.085 jiwa/hari pada tahun 1986. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel secara stratified random sampling terhadap 219 KK dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara berstruktur dan mendalam. Lokasi penelitian dilakukan selain di kota baru, juga diambil kota pembanding Bekasi yang dianggap dapat mewakili kondisi kota baru pada tahap yang sudah lebih berkembang. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan persentase maupun dengan uji statistik Kruskal Wallis dan tes U-Mann Whitney (X²). Penelitian menghasilkan temuan bahwa untuk kegiatan bekerja, di kota baru perlu adanya sumber penggerak kerja (employment generator) dan kesempatan antara (intervening opportunity) yang dalam hal adalah kota Tangerang, keberadaan PUSPIPTEK, ITI dan pabrik-pabrik sepanjang jalan Serpong-Tangerang. Selain itu, perlu dipikirkan pembangunan fasilitas perkantoran baik pemerintah maupun swasta karena adanya kecenderungan kota baru diisi oleh orang-orang yang berstatus kerja mantap sehingga sulit untuk pindah kerja. Untuk fasilitas perkotaan lainnya perlu dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas yang memadai tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Khusus untuk fasilitas pendidikan perlu prioritas pembangunan lebih banyak SD karena tingginya angka keluarga-keluarga muda.